

Vol. XV, NO. 1, Januari - Juni 2018

ISSN: 1693-9867 (p); 2527-5119 (e)

AL-A'RAF

Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat

AL-A'RAF

Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat

Editorial Team:

Editor in-Chief

Islah Gusmian, IAIN Surakarta

Editorial Board

Mahrus eL-Mawa, Kementerian Agama Republik Indonesia Jakarta

Media Zainul Bahri, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga

M. Endy Saputro, IAIN Surakarta

Nashruddin Baidan, IAIN Surakarta

Managing Editor

Nur Kafid, IAIN Surakarta

Editor

Subkhani Kusuma Dewi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Yuyun Sunesti, UNS Solo

Editorial Assistant

Nur Rohman, IAIN Surakarta

Siti Fathonah, IAIN Surakarta

Reviewer

M. Faisol Fatawai, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang

Abad Badruzzaman, IAIN Tulung Agung

Fadhli Lukman, Universität Freiburg, Germany

Ahmad Fawaid Sjadzili, IAIN Madura

Ahmad Fuad Fanani, University of Toronto, Canada

Jajang A Rohmana, UIN Sunan Gunung Djati

Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, UIN Ar-Raniry-Banda Aceh

Alamat Redaksi:

Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Surakarta.

Jl. Pandawa No. 1, Pucangan, Kartasura, Jawa Tengah, 57168

Phone: +62271-781516, Fax: +62271-782774.

e-mail: jurnal.alaraf@gmail.com

web: <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-araf>

AL-A'RAF

Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat

Tabel of Content

Almawardi dan Konsep Khilafah Islamiyyah: Relevansi Sistem Politik Islam Klasik dan Politik Modern Muzayyin Ahyar	1
Politik Islam Mahathir Mohammad di Malaysia dan Soeharto di Indonesia M. Zaki Mubarak & Mohamad Zaini Abu Bakar	27
Basis Etika Lingkungan Hidup Masyarakat Tradisional Madura Hasani Utsman	59
Jejak Sejarah Pergeseran Identitas Agamis Menjadi Pub-Kultur di Pati Fathimatuz Zahra	79
Ideologi 'Kanca Wingking': Studi Relasi Kuasa Pengetahuan dalam Tafsir Alhuda Suci Wulandari	101
Kerangka Paradigmatik Tafsir Alqur'an Alkarim Karya Mahmud Yunus Zulyadain	127
Pemikiran Filsafat Manusia Ibnu Miskawaih: Telaah Kritis Atas Kitab Tahdzib Alakhlaq Syamsul Bakri	147
<i>Author Guideline</i>	167

POLITIK ISLAM MAHATHIR MOHAMMAD DI MALAYSIA DAN SOEHARTO DI INDONESIA

M. Zaki Mubarak
Mohamad Zaini Abu Bakar
Universiti Sains Malaysia

Abstrak

Keywords:

Iron Cage,
Political
Contestation,
Political Islam

Studi ini menjelaskan tentang peran dan strategi pemerintah Malaysia pada era Mahathir Mohammad dan Indonesia pada masa Soeharto, dalam menghadapi kelompok Islamis penentangannya. Pada masa awal berkuasa, kedua rejim lebih banyak menggunakan 'tangan besi' untuk mengalahkan musuh politiknya. Mahathir bertarung dengan kekuatan Parti Al-Islam Se-Malaysia (PAS) yang makin radikal sejak awal 1980-an, sementara Soeharto sejak awal 1970-an berhadapan dengan kelompok Islam ekstrem. Mahathir masih menyisakan ruang untuk berkompetisi, Soeharto tidak mau berkompromi. Dalam perkembangannya, kedua rejim memilih strategi yang lebih lunak dengan memainkan 'kartu Islam' dengan tujuan ganda: mengkooptasi lawan dan membangun *image* yang lebih baik sebagai rejim bercorak Islami. Karenanya, proyek politik Islamisasi Mahathir dan Soeharto tidak dapat dipisahkan dari persoalan kontestasi politik domestik dan usaha mencari legitimasi baru. Proyek politik Islam keduanya pun berakhir berbeda. Krisis moneter dan reformasi demokrasi pada tahun 1998 berakibat pada jatuhnya rejim Suharto dan mengakhiri semua proyek politik yang telah dirancangnya. Sebaliknya, rejim Mahathir berhasil survive dari krisis serupa sehingga kebijakan pro-Islamnya terus berlangsung meski tidak seagresif masa sebelumnya.

Abstract

This study explains the role and strategy of Malaysia during Mahathir Mohammad era and Indonesia in the Soeharto era in facing their Islamists group opposition. In their early period, these two regimes used an iron cage to defeat their political enemies. Mahathir fought with the power of PAS (Parti Al-Islam Se-Malaysia) which becomes more radical in the early of 1980s; meanwhile, Suharto faced the Islamic extremist groups in the early of 1970s. Mahathir consisted to give enough spaces

for competition, Suharto did not want to compromise. In its progress, these two regimes chose softer strategy by playing 'Islamic cards' due to the double purposes: coopting the opposite and building a better image as an Islamic regime. Hence, the political project of Islamization of Mahathir and Soeharto could not be separated from the problem of domestic political contestation and an effort to look for new legitimacy. Thereby, their Islamic political projects ended differently. Due to the monetary crisis and democratic reforms in 1998 affected the Soeharto regime to step down and make an end to all of the political projects he has designed. On the contrary, the Mahathir regime has successfully survived in facing the similar crisis, so that his pro-Islamic policy has passed off although not as aggressive as in the past.

Pendahuluan

Mundurnya Presiden Soeharto pada Mei 1998 menjadi babak akhir bagi politik Islamisasi pemerintahan Orde Baru yang telah berjalan sejak akhir 1980-an. Kekuatan Islam yang pada masa awal rejim Orde Baru hanya diberi peran marginal mengalami perubahan 'dramatis' seiring dengan politik akomodasi Soeharto. Islam di tarik ke tengah kekuasaan dan menjadi bagian penting rejim. Politik Islamisasi ini menandai perubahan penting dalam lanskap sejarah politik Indonesia dan sekaligus, setidaknya untuk sementara waktu, menepis anggapan bahwa rejim Orde Baru bersifat antipati terhadap aspirasi dan kepentingan umat Islam. Aliansi politik pro-Islam yang dibangun membawa sejumlah konsekuensi, di antaranya; fragmentasi politik yang kian meruncing, baik diinternal kelompok Islam, tentara, dan sejumlah kelompok politik yang sebelumnya menjadi mitra politik Soeharto. Strategi ini pada awalnya dirancang untuk mengatasi musuh-musuh domestiknya.

Di Malaysia, politik Islamisasi menjadi bagian penting bagi konsolidasi politik Mahathir Mohammad setelah berhasil memegang tampuk kekuasaan. Dihadapkan dengan bangkitnya arus Islam garis keras pasca revolusi Iran, Mahathir mengambil cara yang berbeda dengan Soeharto di masa awal kekuasaan. Bila Soeharto sejak awal 1970-

an dengan dukungan penuh tentara bersikeras melawan politik Islam melalui pengucilan dan represi, Mahathir memilih menghadapi penentang Islamisnya dengan memainkan ‘kartu Islam’. Pilihan strategi Mahathir terbukti lebih efektif dan berhasil. Pergulatan politik Islamisasi di Malaysia era Mahathir (1981-2003) bertumpu pada tiga kekuatan inti: Pemerintah, United Malays National Organization (UMNO) selaku partai penguasa, dan Parti Al-Islam Se-Malaysia (PAS) sebagai partai oposisi.¹ Isu etnisitas dan identitas Melayu berulang kali dimanfaatkan untuk menghadapi penentangan kelompok-kelompok minoritas di Malaysia.

Sejarah telah menunjukkan akhir nasib politik yang berbeda antara Mahathir Mohammad dan Soeharto. Mahathir jauh lebih beruntung nasib politiknya. Ia menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003 ditengah pendukungnya, dan UMNO yang masih memegang kendali kekuasaan. Selain itu, Mahathir juga masih dianggap sebagai ‘pahlawan’, karena berhasil menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara paling modern di kawasan Asia Tenggara.² Sementara Soeharto bernasib ‘tragis’. Setelah berbalik arah dengan memainkan kartu Islam, Ia dipaksa mundur akibat tekanan kuat reformasi.

Perkembangan politik Islam kontemporer di Malaysia dan Indonesia menarik untuk diangkat dalam sebuah studi perbandingan. Kedua negara tersebut berpenduduk mayoritas Muslim, Islam menjadi salah satu unsur penting dalam politik, dan memiliki pengalaman panjang dalam sistem semi otoritarian. Pemerintahan Mahathir di Malaysia yang cukup panjang (1981-2003) dan Soeharto di Indonesia yang jauh lebih lama lagi (1967-1997), telah menempatkan keduanya sebagai tokoh penting yang sangat berpengaruh dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara,

¹ Jan Stark, “Constructing an Islamic Model in Two Malaysian States: PAS Rule in Kelantan and Terengganu,” *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia* 19, no. 1 (2004): 51–75, <https://muse.jhu.edu/article/400296/pdf>.

² Pembangunan dan modernisasi yang berjalan dengan cepat di Malaysia dibawah Mahathir Mohammad dapat dibaca antara lain dalam Barry Wain, *Malaysian Maverick: Mahathir Mohammad in Turbulent Times* (London: Palgrave Macmillan, 2009), bab. 4.

ditambah lagi dengan pola pengelolaan kekuasaan yang sentralistik.³ Mahathir dan Soeharto berkuasa dengan ditopang dua kekuatan politik yang relatif sama, berkecenderungan “sekular” dan tidak memiliki *credential* Islam. Mahathir ditopang oleh UMNO, Soeharto di dukung oleh Golongan Karya (Golkar). Tentara menjadi unsur penting penopang kekuasaan otoriter Soeharto, sedang di Malaysia tantara tidak menjadi kekuatan politik yang menentukan. Kedua partai politik pemerintah, UMNO dan Golkar, memegang kekuasaan yang hampir tanpa saingan.

Secara umum, antara Mahathir dan Soeharto memiliki sejumlah kesamaan dalam hal tantangan politik, terutama pada masa awal kekuasaan. Apa yang didefinisikan sebagai “Islam Politik”, yang memandang secara rendah dan sinis terhadap bangunan politik kenegaraan yang ada, karena dianggap tidak Islami bahkan banyak bertentangan dengan ajaran Islam. Bagi Mahathir, tantangan itu muncul dari kekuatan konservatif Islam yang berhimpun dalam PAS. Sedangkan bagi Soeharto, sumber ancaman dari kubu Islam berasal antara lain dari politisi partai politik Islam yang sulit diatur dan kelompok Islam militan di luar pemerintahan.⁴

Di awal kekuasaannya, Mahathir harus menghadapi ‘serangan’ dari lawan Islam konservatifnya, hingga menuduh kekuasaannya sebagai anti-Islam, bahkan *kufur*. Soeharto juga menghadapi hal yang sama, aliansi politik dengan tentara, politisi “abangan”, dan sebuah lembaga pemikir (*think-tank*) Katholik yang diberikan kekuasaan besar untuk campur tangan politik, telah memicu amarah dan kebencian di kalangan Islam. Mereka melihat apa yang dikerjakan Soeharto dan *inner circle*-nya itu

³ Kajian yang menarik tentang asal usul demokrasi dan otoritarianisme yang berkembang di Indonesia dan Malaysia, dapat ditemukan dalam kajian komparatif yang mendalam dan menarik oleh Syed Farid Alatas dalam, *Democracy and Authoritarianism in Indonesia and Malaysia* (London: Macmillan Press, 1997).

⁴ Sebagaimana diuraikan dalam John Bresnan, *Managing Indonesia: The Modern Political Economy* (New York: Columbia University Press, 1993), terutama pada bab. 9, 218-244. Lihat juga, Marcus Mietzner, *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Turbulent Transitions to Democratic Consolidation*, (Singapura, ISEAS, 2009), 88.

sebagai cara untuk menyingkirkan Islam dari panggung politik. Periode awal kedua penguasa semi-otoritarian itu dikenal sebagai masa paling represif, yang tidak hanya untuk memukul lawan Islamnya tetapi juga unsur-unsur penentang lainnya.

Secara umum, tulisan ini mengkaji dinamika sosio-historis hubungan pemerintah dan Islam dalam lanskap politik di Malaysia pada masa Mahathir dan Indonesia era Soeharto. Secara lebih spesifik untuk menganalisis bagaimana proses politik Islamisasi yang dilakukan kedua rejim tersebut berlangsung, motif serta kondisi-kondisi yang mendasari pilihan strategi menggunakan 'kartu' Islam dan efektifitasnya.

Sejumlah studi tentang relasi Islam dan politik di Malaysia dan Indonesia telah banyak dikerjakan oleh para ahli. Namun kajian terkait Islam dan politik di kedua negara tersebut masih jarang yang bersifat komparatif atau perbandingan sehingga banyak sekali aspek yang tidak terungkap. Mahathir dan Soeharto telah berhasil memainkan kartu Islam sebagai bagian dari strategi untuk mempertahankan kekuasaan dan meraih dukungan rakyat. Kenyataan bahwa mayoritas penduduk di kedua negara itu beragama Islam terlihat menjadi sangat lumrah bagi aktor-aktor politik untuk mengeksploitasi agama (Islam) sebagai sumber daya politik. Lee (2010) dan Liow (2009) misalnya, menunjukkan bagaimana elite pemerintah sejak awal masa kekuasaan Mahathir tahun 1981 sangat aktif "menggunakan" Islam untuk kepentingan politiknya. Kartu Islam dan isu bumi putera digunakan rejim silih berganti untuk melemahkan kompetitor politiknya, terutama muslim konservatif yang berafiliasi dengan PAS dan kelompok etnis China yang berjuang mendapatkan akses kekuasaan lebih besar. Politik Islamisasi Mahathir, menurut Lee dimulai dengan ditematkannya sejumlah tokoh Islam dalam birokrasi pemerintahan dan jabatan strategis partai UMNO, pembangunan simbol-simbol Islam, hingga pernyataan Malaysia sebagai negara Islam.⁵ Strategi

⁵ Julian C.H Lee, *Islamization and Activism in Malaysia* (Singapore: ISEAS, 2010)

ini dipergunakan oleh Mahathir hingga pemerintahan setelahnya untuk mendapatkan dukungan atau legitimasi Islam bagi pemerintah maupun partai penguasa. Liow melakukan studi yang lebih luas dengan melihat akar kelahiran politik Islam di Malaysia sejak fase formatifnya.⁶ Ia menemukan hal yang sama, bahwa politik Islamisasi yang dilakukan Mahathir dan penerusnya tidak dapat dipisahkan dari keinginan pemerintah untuk meraih legitimasi Islam, dan sekaligus telah “memotong” pengaruh PAS dengan memberikan jaminan bahwa kebijakan pemerintahan UMNO adalah pro-Islam. Sementara politik Islam model PAS sangat sibuk dengan agenda-agenda konservatisme dan puritanisme, serta hukum *hudud* yang menjadi unggulannya. Mahathir dan UMNO mencoba menawarkan wajah Islam lain yang coba dicitrakan lebih modern dan moderat. Islamisme yang dipadukan dengan otoritarianisme menjadi ramuan politik yang terus digenggam pemerintahan Mahathir hingga pengunduran dirinya tahun 2003.

Studi perbandingan bentuk Islamisasi politik juga dilakukan oleh Nasr (2001) yang menyoroti pemerintahan Mahathir di Malaysia dan Jenderal Zia ul-Haq di Pakistan.⁷ Kedua rejim tersebut melakukan politik Islamisasi sebagai respon atas persoalan dan tantangan internal maupun eksternal. Mahathir dan Zia sama-sama memanfaatkan Islam dalam konsolidasi kekuasaannya, sekaligus menggunakan cara-cara repressif terhadap musuh politiknya. Islamisasi yang dilakukan oleh kedua rejim ini erat kaitannya dengan strategi pengelolaan negara. Islamisasi di masa Mahathir diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, sedangkan Zia ul-Haq lebih diarahkan untuk mengembalikan otoritas negara yang penuh gejolak dan konflik. Proyek Islamisasi di Malaysia jauh lebih berhasil dibanding Pakistan, ditandai dengan kemampuannya memecah kelompok

⁶ Joseph Chinyong Liow, *Piety and Politics: Islamism in Contemporary Malaysia* (Oxford: Oxford University Press, 2009)

⁷ Seyyed Vali Reza Nasr, *Islamic Leviathan: Islam and the Making of State Power* (Oxford: Oxford University Press, 2001)

Islamis konservatif dan mengkooptasi sebagian melalui UMNO yang aktif mengakomodasi sejumlah politisi Islamis. Sementara di Pakistan, Islamisasi politik Zia ul-Haq menghadapi tantangan keras, baik dari kubu Islamis militan maupun partai politik sekular.

Di sisi lain, Alatas (1997) memfokuskan pada pertumbuhan demokrasi dan otoritarianisme di Indonesia dan Malaysia⁸, sejalan dengan Syamsul Hadi (2005) yang mengulas aspek strategi pembangunan ekonomi Mahathir dan Soeharto saat berada dalam kekuasaan.⁹

Sementara terkait dengan berbagai kebijakan Soeharto terhadap Islam masa Orde Baru, Ramage (1995) menyoroti munculnya aktor-aktor baru yang berperan penting sejak awal 1990-an, NU yang dipimpin oleh Abdurrahman Wahid dan perkumpulan intelektual muslim yang tergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang diketuai oleh B.J. Habibie.¹⁰ Jika NU membangun aliansi dengan kelompok kritis di luar kekuasaan dan unsur-unsur Nasionalis-Sekular, ICMI berperan aktif memobilisasi dukungan Islam untuk kepentingan Soeharto. Gejolak politik yang dipenuhi konflik dan faksionalisme yang melibatkan faksi Islam kritis dan Islam rejimis menjelang lengsernya Soeharto juga menjadi fokus kajian Porter.¹¹ Porter melihat perubahan politik Soeharto menjadi pro-Islam dengan menelusuri dinamika sosis-politik kebelakang, dari semenjak aliansi awalnya dengan Nasionalis-Militer-Katolik yang dipersepsikan “anti muslim”, hingga kebutuhan Soeharto untuk menjadikan Islam sebagai mitra barunya, sembari meninggalkan aliansi lamanya yang sudah dianggap tidak efektif. Aliansi baru itu menimbulkan kegoncangan, terutama bagi

⁸ Syed Farid Alatas, *Democracy and Authoritarianism in Indonesia and Malaysia* (London: Macmillan Press, 1997).

⁹ Syamsul Hadi, *Strategi Pembangunan Mahathir dan Soeharto* (Jakarta, Pelangi Cendekia, 2005)

¹⁰ Douglas, E. Ramage, *Politics in Indonesia: Democracy, Islam, and the Ideology of Tolerance*, (London: Routledge, 1995).

¹¹ Donald J. Porter, *Managing Politics and Islam in Indonesia*, (London: Routledge, 2002), terutama pada Bab. 7.

militer yang tidak lagi diperhatikan. Pertikaian antara kelompok Islam yang telah dikooptasi, Porter menyebutnya sebagai “*incorporated Islam*” dengan unsur-unsur militer.

Anwar dan Hefner melihat pergeseran ke arah pro-Islam ini tidak hanya dalam konteks politik, tetapi juga aspek sosiologis dan historis seiring dengan munculnya kelas menengah muslim yang semakin berpengaruh dalam pemerintahan.¹² Kelompok baru intelektual muslim ini memerlukan akses yang lebih luas dalam bidang politik dan ekonomi. Liberalisasi yang secara perlahan mulai berjalan menjadi keuntungan tersendiri. Pada saat bersamaan terjadi pertemuan saling menguntungkan antara mereka dengan Soeharto yang ingin memperbaharui legitimasi politiknya, sehingga terjadilah koalisi. Kelompok muslim baru menjadi bagian pemerintahan, yang sebagian besar enggan untuk terlibat aktif dalam reformasi demokratisasi. Sebagian dari mereka justru lebih vocal menyerang inisiatif gerakan demokratisasi ini. Kelompok ini oleh Hefner disebut sebagai “Islamis-Rejimis”.

Bahtiar Effendy¹³ dengan menelusuri lebih jauh kebelakang pada proses terbentuknya Indonesia menjelang dan sesaat setelah proklamasi, menemukan adanya pertarungan ide dan ketegangan yang melibatkan kelompok Islam dan nasionalis. Kompromi antar kedua kelompok ini tidak pernah tuntas, sejak proklamasi hingga masa Orde Baru. Maka tidak mengherankan jika pada setiap masa pergantian rejim, isu-isu ini muncul kembali, seperti kasus Piagam Jakarta. Soeharto tidak pernah mentoleransi aspirasi ini. Aliansi Soeharto dan Islam didasari oleh semangat saling membutuhkan dan saling memanfaatkan. Akomodasi Islam Soeharto bersifat selektif, dengan menegaskan aspirasi yang bersifat ideologis dan tidak melibatkan aktifitas Islam yang kritis.

¹² Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. (Princeton: Princeton University Press, 2000)

¹³ Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik di Indonesia* (Jakarta: Paramadina dan PPIM, 2009)

Persetereuan Politik dan Upaya Mempertahankan Kekuasaan

Eickelman dan Piscatori mendefinisikan politik muslim sebagai “melibatkan kompetisi dan persaingan penafsiran simbol dan kontrol atas lembaga, baik formal maupun informal, yang memproduksi dan mempertahankan simbol-simbol dan lembaga-lembaga tersebut.”¹⁴ Keduanya berpendapat bahwa Islam telah menjadi bahasa utama politik, mereka menekankan multiplisitas interpretasi dalam konteks pergeseran dan perkembangan makna serta penggunaan simbol, nilai, dan tradisi. Hal ini disebabkan baik untuk diversitas dari *interpreters* (ulama tradisional dan kaum intelektual modernis) dan beragam konteks politik dan budaya. Para aktor secara efektif menunjukkan bahwa sifat, agenda tertentu, taktik, dan tujuan kelompok Islamis yang beragam, berakar dalam konteks tertentu seperti akar sosio-historis dan sebab-musababnya.

Pergumulan politik dengan saling memanfaatkan isu Islam, juga dapat dijelaskan melalui pendekatan perseteruan politik atau *contentious politics*. Dinyatakan bahwa perseteruan politik muncul pada saat terjadi perubahan dalam kesempatan-kesempatan politik dan tantangan yang menyediakan insentif-insentif baru (material, sosial, politik, dan sebagainya) bagi sejumlah aktor.¹⁵ Melalui pendekatan ini “politisasi Islam” dilihat sebagai ajang pertarungan sejumlah kelompok sosial politik, (negara, partai politik, ormas, kelompok kepentingan, dan sebagainya) untuk mencapai sejumlah tujuan tertentu. Bagi kekuatan dominan atau sedang berkuasa, cara-cara yang dilakukan utamanya untuk mempertahankan dan membentuk hegemoni. Sedang bagi aktor-aktor sosial yang lebih marginal, gerakan dimaksudkan untuk mendapatkan sejumlah keuntungan, misalnya: posisi yang lebih baik hingga merebut kekuasaan. Sejumlah faktor penting yang memberikan pengaruh besar bagi sukses atau tidaknya tindakan itu antara

¹⁴ Dale F. Eickelman, dan James Piscatori, *Muslim Politics* (New Jersey: Princeton University Press, 1996), 3-5.

¹⁵ Sidney G. Tarrow, *Power in Movement: Social Movement and Contentious Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 11.

lain seberapa besar sumber daya (*resources*) yang dimiliki, ketrampilan membangun *framing*, dan struktur kesempatan politik (*structure of political opportunity*) yang tersedia.¹⁶

Dengan melihat para pelaku politik sebagai aktor-aktor rasional, pilihan strategi politik yang mereka lakukan, entah itu yang mengeksploitasi isu identitas politik seperti agama, budaya, adat, etnisitas, perlu dipahami dalam kerangka mendapatkan keuntungan-keuntungan politik dan menghindari kerugian. Seperti dicatat oleh Geddes, tindakan rasional politisi yang berada di pemerintahan, termasuk bagi kepala pemerintahan (pejabat Presiden atau Perdana Menteri) terutama ditujukan untuk mempertahankan posisinya dan memperluas jangkauan atau pengaruh kekuasaannya. Bila mereka dihadapkan dengan sejumlah pilihan yang dianggapnya tidak atau kurang memberi keuntungan, maka kebijakan dengan resiko kerugian paling minimal yang akan diambilnya.¹⁷ Kebijakan berbasis pilihan rasional juga berlaku bagi para penentang politik yang berada di luar kekuasaan. Isu-isu identitas politik, termasuk keagamaan, ditangan kekuatan-kekuatan politik marginal mencerminkan suatu strategi bersifat perlawanan (*resistance identity*) yang salah satu tujuannya untuk merebut kekuasaan. Sebaliknya, dalam kompetisi yang berjalan, rejim yang berkuasa juga akan terus berupaya mereproduksi dan memperkuat identitas politik, yang disebut Castells sebagai identitas yang melegitimasi (*legitimizing identity*) untuk melanggengkan dominasi kekuasaannya.¹⁸

¹⁶ Lihat, Doug McAdam, Siney Tarrow, and Charles Tilly, "Comparative Perspectives on Contentious Politics" dalam Mark Irving Licbach and Alan S. Zuckerman, *Comparative Politics: Rationality, Culture, and Structure*, (Cambridge, Cambridge University Press, 2009), 263-265.

¹⁷ Barbara Geddes, *Politician's Dilemma: Building State Capacity in Latin America* (Berkeley: University California Press, 1994), terutama bab 6.

¹⁸ Manuel Castells, *The Power of Identity* (United Kingdom: Blackwell Publishing, 2004), 2-edition, 8-9.

Islam dalam Periode Formatif Bangsa

Studi tentang perkembangan politik di Indonesia dan Malaysia, dua negara dengan populasi muslim terbesar di kawasan Asia Tenggara, sejak masa formatif hingga saat ini sulit dipisahkan dari faktor-faktor seperti keagamaan dan etnisitas. Di dua negara ini, terutama di Malaysia, Islam dan etnisitas (Melayu) menjadi bagian integral.¹⁹ Tantangan menyangkut posisi dan peran Islam yang khas dalam kebijakan negara, juga dianggap tantangan bagi supremasi Melayu. Di Indonesia, meski tidak sekuat di Malaysia, Islam juga menjadi identitas tidak terpisahkan dari identitas keindonesiaan.²⁰ Kondisi inilah yang kemudian menjadikan kekuatan-kekuatan sosial dan politik, termasuk negara itu sendiri, menggunakan Islam dalam pergulatan politik untuk menjustifikasi dasar perjuangan dan kepentingannya.²¹ Meski diakui peran pentingnya dalam proses pembentukan negara bangsa (*nation building*), politik yang menggunakan preferensi Islam dan cita-cita Islam menjadi persoalan krusial di negara yang majemuk seperti di Indonesia²² dan Malaysia²³.

Proses pembuatan konstitusi Malaysia berbeda secara radikal dengan proses lahirnya konstitusi di Indonesia, saat itu masih Hindia Belanda. Sebagai bagian dari negara persemakmuran, pembuatan konstitusi Malaysia sebelum masa kemerdekaan menjelang akhir 1940-an

¹⁹ Dominik M. Müller, *Islam, Politics and Youth in Malaysia: The Pop-Islamist Reinvention of PAS* (New York: Routledge, 2014), 10.

²⁰ Jeremy Menchik, "Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi Party between Democracy and Integralism by Remy Madinier (Review)," *Project Muse Indonesia*, no. 101 (2016): 139–143.

²¹ Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik di Indonesia*, ... Untuk kajian terbaru, lihat: Carool Kersten, *Islam in Indonesia: The Contest for Society Ideas and Values* (Oxford: Oxford University Press, 2015).

²² Darmawijaya, "Islam Dan Kekuasaan Orde Baru: Membaca Kembali Politik De-Islamisasi Soeharto," *Sosiologi Reflektif* 10, no. 1 (2015): 63–84.

²³ Ahmad Fauzi, Abdul Hamid, and Muhamad Takiyuddin, "Islamist Conservatism and the Demise of Islam Hadhari in Malaysia," *Routledge, Taylor & Francis Group. London & New York* 25, no. 2 (2014): 159–180, <http://dx.doi.org/10.1080/09596410.2014.880549>.

tidak dapat dilepaskan dari peran *The Reid Commission*, sebuah komisi di bawah kuasa kerajaan Inggris yang mendapatkan tugas merumuskan draf awal konstitusi.²⁴ Komisi ini melibatkan perwakilan dari sejumlah negara persemakmuran lainnya. Sebagai wilayah di mana para sultan berkuasa, maka dalam fase formatif kelahiran Malaysia termasuk pembuatan konstitusinya, perlu mendengar aspirasi dari para sultan yang menghendaki negara baru ini tidak menghilangkan peran eksklusif mereka. Mau tidak mau, tim perumus konstitusi harus mendengar dan mengakomodasi sejumlah kepentingan yang disuarakan sultan dan raja, yang secara faktual memiliki kekuasaan di daerah masing-masing.

Bila dibandingkan dengan UUD 1945, konstitusi Malaysia lebih bersifat “Islami”. Di sana, dengan jelas disebutkan bahwa Islam merupakan agama resmi Negara. sementara dalam konstitusi Indonesia, meski banyak usulan di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang menyerukan Islam dimasukkan dalam bagian-bagian konstitusi, tetapi hasil akhirnya konstitusi bersih dari ungkapan-ungkapan Islam. Apalagi dengan dihilangkannya kalimat dalam Piagam Jakarta, yang menyatakan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dari aspek itu dapat ditafsirkan bahwa konstitusi Malaysia memberikan keberpihakan atau kecondongan kepada Islam, bukan kepada agama/keyakinan lain, ataupun bersifat sekuler.

Hingga sekarang masih berlangsung perdebatan untuk menafsirkan makna “Islam sebagai agama Negara” dalam konstitusi. Satu pihak menafsirkan sebagai landasan atau dasar bagi Malaysia sebagai suatu Negara Islam, atau setidaknya Negara yang memberikan supremasi kepada Islam. Yang lain menafsirkan bahwa konstitusi Malaysia pada dasarnya lebih bersifat sekular. Pernyataan “Islam sebagai agama Negara” tidak dapat dipahami sebagai dasar formal pengakuan atas Malaysia sebagai

²⁴ Abdul Rashid Motten (editor), *Government and Politics in Malaysia* (Malaysia: Cengage Learning, 2012), 106.

Negara agama, sebab pada praktiknya hal itu lebih bersifat untuk keperluan seremonial.

Dalam artikel (3) konstitusi Malaysia dinyatakan, bahwa Islam sebagai agama resmi federasi, agama lain diijinkan untuk dipraktikkan. Terdapat beberapa penafsiran, sejumlah ahli menyatakan Islam agama resmi hanya sekadar fungsi seremonial dan sifatnya lebih bersifat sekular. Sementara bagi ahli lain, posisi Islam sebagai agama resmi memiliki makna substansial dan mendasar. Artikel 3 (1) berbunyi , “*Islam is the religion of federation; the other religions may be practiced in peace and harmony in any part of the federation*”. Artikel 11 (4) menyatakan tentang pembatasan dakwah atau penyebaran agama lain terhadap pemeluk Islam. Pada artikel 12 (2) berisi soal ketentuan pemberian izin kepada federasi maupun negara untuk membentuk serta menjaga lembaga-lembaga Islam.²⁵

Dalam konstitusi dinyatakan, bahwa bentuk pemerintahan Malaysia adalah monarki. Yang Dipertuan Agung secara otomatis menjabat sebagai Pimpinan Islam di negara itu. Ia memiliki wewenang menyetujui beberapa amandemen terhadap konstitusi Negara. Seperti disampaikan sebelumnya, kekuasaan Yang Dipertuan Agung semakin bersifat seremonial dan secara politis, meskipun memiliki sejumlah kewenangan yang terlihat penting dalam konstitusi, tetapi pada dasarnya hanya bersifat simbolik belaka.²⁶

Di Indonesia, perdebatan mengenai agama (Islam) dan negara masuk ranah insituti politik dapat dilihat dalam sidang BPUPKI pada 29 Mei-1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI membahas dasar negara sebagai masalah pokok; apakah negara Indonesia yang akan didirikan berdasarkan agama (Islam) atau tidak? Silang pendapat mengenai dasar negara ini terpolarisasi menjadi dua kelompok *mainstream*, sebagaimana diakui Supomo pada 31 Mei 1945. Ia menyatakan adanya dua paham yang terbentuk: mereka yang menginginkan Indonesia didirikan sebagai negara

²⁵ Abdul Rashid Motten (editor), *Government and Politics in Malaysia*, 31

²⁶ Abdul Rashid Motten (editor), *Government and Politics in Malaysia*, 12-13

Islam, dan mereka yang menginginkan pemisahan antara urusan negara dengan Islam, dengan kata lain Indonesia bukan sebagai negara Islam.²⁷

Beberapa masalah krusial yang memunculkan debat antara golongan Islam dan nasionalis, antara lain soal ketentuan untuk menjadi presiden dan posisi Islam negara baru. Kelompok Islam menambahkan ketentuan “beragama Islam” sebagai syarat menjadi Presiden, serta menuntut agar Islam dijadikan sebagai agama resmi negara. Usulan itu tidak mendapatkan sambutan kelompok nasionalis yang khawatir, bahwa bila aspirasi kelompok Islam itu dipenuhi maka berpotensi memunculkan perpecahan. Sejumlah kompromi diupayakan untuk mendapatkan rumusan yang bisa diterima semua pihak di tengah waktu yang sangat mendesak. Dalam prosesnya, wakil-wakil golongan Islam lebih banyak mengalah demi alasan menjaga persatuan.

Perdebatan yang hampir sama kembali terulang dalam konstituante hasil pemilu 1955, di mana kelompok Islam mengajukan usulannya untuk menjadikan Islam sebagai ideologi negara. Mereka berhadapan dengan kelompok nasionalis dan komunis yang memilih Pancasila dan bukan Islam, untuk dijadikan dasar negara. ‘Perkubuan’ yang terbentuk hampir sama dengan apa yang berlangsung lebih 10 tahun sebelumnya di BPUPKI. Perdebatan ini terus meruncing dan gagal menemukan kesepakatan, hingga berujung pada keluarnya Dekrit Presiden 1959 tentang pembubaran konstituante.

Dibandingkan dengan Malaysia yang lebih banyak mengakomodasi Islam dalam konstitusinya, corak dan isi konstitusi Indonesia, UUD 1945, tidak secara eksplisit memberikan *privilege* kepada kelompok Islam. Meskipun dalam praktik politiknya, berbagai institusi khusus kemudian dibentuk untuk melayani kepentingan umat Islam.

²⁷ Moh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar I-III* (Jakarta: Jajasan Prapanca, 1959), 115.

Menghadapi Para Penentang Islamis

Periode paling bergolak dalam konflik antara pemerintah dengan unsur-unsur Islam konservatif yang kian radikal, berlangsung di Malaysia pasca terjadinya revolusi Iran 1978/1979. Kemenangan para Ayatullah di Iran membawa dampak signifikan dalam politik domestik Malaysia, ditandai antara lain dengan menguatnya sentimen Islam pasca revolusi yang berhasil menumbangkan Syah Iran. Pengaruh revolusi Islam ini menyebar ke berbagai penjuru dunia Islam, tidak terkecuali Malaysia. Demam revolusi Islam juga berdampak dengan semakin aktifnya isu-isu Islam (di) muncul(kan) ke ruang publik Malaysia. PAS dengan gesit memanfaatkan bangkitnya sentimen Islam untuk kampanye-kampanye politik. PAS menegaskan bahwa pilihan kepada Islam akan membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, sebagaimana telah dibuktikan di Iran melalui revolusi.

Isu-isu Islam yang kasar mulai dilancarkan PAS untuk membombardir UMNO yang berkuasa. Ungkapan “takfir” atau pengkafiran dan jihad mulai bemunculan pada masa itu. Tuduhan *takfir* terhadap UMNO pertama kali disampaikan oleh ulama PAS pada 1979.²⁸ Saling mengkafirkan terjadi lagi pada 1981. Dalam pernyataan yang dikenal sebagai “Amanat Haji Awang” disampaikan bahwa UMNO mempertahankan undang-undang kafir, kemudian siapa yang menyumbang dan aktif di PAS dapat dianggap telah berjihad. Selain itu, konsep pemisahan agama dan politik sebagaimana berlaku di Malaysia di bawah rezim UMNO dianggap mengingkari ajaran Islam.²⁹ Pada intinya, pertarungan di ranah politik dalam menghadapi pemerintahan UMNO, oleh para politisi PAS telah diseret menjadi suatu medan perjuangan keagamaan untuk membuktikan komitmen sejati kepada Islam.

²⁸ Joseph Chinyong Liow, *Piety and Politics: Islamism in Contemporary Malaysia* (Oxford: Oxford University Press, 2009), 37. Lihat juga, T. N. Harper, *The End of Empire and The Making of Malaya* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 376.

²⁹ Joseph Chinyong Liow, *Piety and Politics: Islamism in Contemporary Malaysia*, 38

Model politik Islamis yang diusung oleh PAS menjadi tantangan besar bagi perdana menteri baru Malaysia, Mahathir Muhammad. Ia menyadari betul bahwa isu-isu yang membawa *credential* Islam menjadi arena pertarungan yang sangat penting sehingga perlu mendapatkan tanggapan. Di sejumlah negara muslim, seperti di Indonesia dan Pakistan, pemanfaatan isu-isu agama dalam kampanye politik menjadi hal yang lumrah. Di Pakistan, politisasi Islam yang ditujukan untuk memobilisasi dukungan kelompok Islamis dan menghancurkan lawan-lawan politiknya dilancarkan secara masif di era Perdana Menteri Zia Ul Haq, sejak ia merebut kekuasaan tahun 1977.³⁰

Pemerintahan Orde Baru Soeharto pada tahun 1970-an memperlihatkan kekhawatiran besar terhadap politik Islam di masa depan. Kekhawatiran itu tidak dipungkiri berpijak pada pengalaman-pengalaman di masa sebelumnya, ketika partai-partai Islam menjadi oposisi pemerintah, dan beberapa kali melakukan kontak senjata, seperti perlawanan Darul Islam, PRRI, dan pemberontakan-pemberontakan regional yang dipelopori oleh dorongan ideologis-politis Islam. Pengalaman ini mempertegas Soeharto menolak upaya rehabilitasi Partai Islam Masyumi. Terhadap partai-partai Islam yang ada, Soeharto juga menunjukkan sikap alergi. Pada pemilu pertama Orde Baru 1971, Partai NU menjadi “korban politik” dari berbagai tindakan represif dan kecurangan yang dilakukan Pemerintah. Partai Islam hasil fusi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dari tahun ke tahun juga tidak bisa lepas dari berbagai rekayasa dan penindasan oleh rejim yang berkuasa. Ormas Islam dan Partai Islam yang ada, di mata pemerintah, menjadi “batu sandungan” bagi kebijakan politik Orde Baru Soeharto yang mengusung konsep pembangunanisme.

Perkembangan itu sangat mengecewakan sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia. Kelompok ini merasa, selain secara politis Islam dilemahkan, pada tahap tertentu hal itu tidak mencerminkan sebagai

³⁰ Seyyed Vali Reza Nasr, *Islamic Leviathan: Islam and the Making of State Power* (Oxford: Oxford University Press, 2001), 130.

negara penduduk muslim terbesar di dunia. Penindasan yang dilakukan oleh pemerintah ini kemudian meletupkan aksi-aksi perlawanan dengan kekerasan sejumlah elemen muslim radikal, seperti: *pertama*, Komando Jihad yang dilakukan Haji Ismail Pranoto, yang dituduh melakukan peledakan beberapa tempat ibadah pada sekitar 1976. *Kedua*, Front Pembebasan Muslim Indonesia oleh kelompok Hassan Tiro pada 1977. *Ketiga*, kelompok Abdul Qadir Djaelani yang menyatakan dirinya sebagai penganut “Pola Perjuangan Revolusiner Islam pada 1978. *Keempat*, Komando Jihad oleh kelompok Warman pada 1978, 1979, dan 1980. *Kelima*, kelompok Imran Muhammad Zein yang menggerakkan revolusi Islam di Indonesia pada 1980-1981.³¹

Periode awal 1970-an hingga pertengahan 1980-an dikenal sebagai masa penuh ketegangan yang melibatkan Soeharto dengan kelompok-kelompok Islam. Pada periode 15 tahun pertama di kekuasaan, demi “ketertiban sosial” dan lancarnya pembangunan, Soeharto secara efektif memanfaatkan sekutu tentaranya dalam banyak aksi represif membungkam lawan-lawan politiknya. Dalam menindas lawan-lawan politiknya, rejim selalu membangun kontruksi berupa pembingkaiian (*framing*) yang bersifat stigmatik. Tidak hanya bagi musuh Islamisnya yang dikampanyekan sebagai “ekstrim kanan”, kelompok “subversif”, “anti-pembangunan”, tetapi juga terhadap pengkritik lainnya yang tidak berasal dari unsur keagamaan yang kerap dituduh sebagai “antek komunis” dan sejenisnya. Bagi Islamis yang tidak mau tunduk, Soeharto lebih memilih menggunakan tangan besi sebagai cara mengalahkannya. Banyak aktifis muslim yang di penjara, dan sebagian lagi melarikan diri ke luar negeri, akibat kebijakan tangan besi ini. Rejim Orde Baru itu sendiri mencitrakan dirinya sebagai pemerintahan yang berorientasi kepada pembangunan, sehingga Soeharto mendapat julukan “Bapak Pembangunan”. Bagi Islamis yang tidak mau tunduk, Soeharto memilih menggunakan tangan besi sebagai cara untuk

³¹ M. Zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran, dan Prospek Demokrasi* (Jakarta: LP3ES, 2008), 67.

mengalahkannya. Akibatnya, banyak aktifis muslim yang di penjara dan sebagian lagi melarikan diri ke luar negeri.

Mahathir: Melawan Islamis dengan Islamisasi

Upaya pemerintahan UMNO dalam merespon meningkatnya Islamisme saat itu menggunakan sejumlah cara. Milne dan Mauzy menyebut strategi yang ditempuh Mahathir, antara lain dengan cara melakukan kooptasi (*cooptation*), pembangunan lembaga-lembaga (*institution-building*) dan cara kekerasan (*coercion*).³²

Strategi “melawan Islam dengan Islam” mulai secara sistematis dan efektif dilakukan oleh Mahathir Muhammad yang pada 1981 terpilih sebagai perdana menteri Malaysia.³³ Menengok kembali ke belakang, terutama di era kepemimpinan awal Mahathir Muhammad, tampak jelas bahwa ia sadar betul perihal penting dan sekaligus bahayanya menggunakan isu-isu keagamaan. Mahathir melihat monopoli isu-isu Islam di tangan para politisi PAS sebagai hal kontraproduktif dalam kaitannya membangun Malaysia yang lebih modern dan plural. Selain merugikan pemerintahan yang berkuasa, isu-isu tersebut hampir selalu berujung pada menyudutkan kebijakan pemerintahan yang dianggap sebagai kurang Islami. Politik Islam yang muncul juga tidak sejalan dengan visi Mahathir yang ingin mendompleng Islam untuk meyakinkan, bahwa keharusan modernisasi dan pembangunan sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Apa yang dimainkan oleh lawan-lawan politik pemerintah adalah isu-isu Islam yang mengarah pada konservatisme.³⁴ PAS misalnya, selalu menekankan wajibnya pemberlakuan syariat Islam tetapi seringkali

³² R.S. Milne and Diane K. Mauzy, *Malaysian Politics Under Mahathir* (London-New York: Routledge,1999), 85-87.

³³ Nurhasanah, “Politik Kebijakan Islamisasi Mahathir,” *Dialog* XXXII, no. 68 (2009): 65–77.

³⁴ Mohamed Nawab and Mohamed Osman, “The Islamic Conservative Turn in Malaysia : Impact and Future Trajectories,” *Contemporary Islam* (2016), <http://dx.doi.org/10.1007/s11562-016-0373-3>.

dalam makna yang sempit: hukum pidana Islam (*hudud*). Sehingga tidak mengherankan bila isu *hudud* selalu mengemuka dalam pernyataan politik keislaman PAS pada setiap momen Pilihan Raya. Kondisi seperti ini, satu sisi tampak memperjelas posisi PAS sebagai partai berideologi Islam, yang berbeda dengan partai politik lainnya. Dengan begitu, PAS ingin memperkuat citranya sebagai partai yang memperjuangkan syariat Islam. Meski begitu, pilihan dan jalan yang ditempuh PAS bukan tanpa akibat. PAS menjelma sebagai satu kekuatan politik yang karena sikap konservatisme-nya yang berlebihan, sulit membangun kerjasama dengan kekuatan politik lain, terutama yang tidak berasaskan agama (Islam).³⁵

Isu-isu Islam yang gencar dilancarkan PAS sejak awal 1980-an, terutama untuk menyerang pemerintah dan UMNO, mendapat respon rejim dengan menggunakan “palu pemukul” yang sama. Seperti dicatat Harper, mulai dari pertengahan 1980-an, para penentang ditanggapi dengan kebijakan Islamisasi mesin pemerintahan (*Islamization of the government machinery*).³⁶ Mahathir dan para penentangannya dari kekuatan politik Islam sama-sama mengangkat pentingnya nilai-nilai Islam diwujudkan bagi masyarakat Melayu. Pandangan dan visi tentang Islam seperti apa yang hendak diterapkan, ada sejumlah perbedaan. Cakupan politik Islam yang diperjuangkan Mahathir berada dalam segi-segi yang lebih luas. Meskipun Mahathir dalam suatu kesempatan menegaskan bahwa Malaysia telah menjadi suatu “Negara Islam”, serta memenuhi kriteria sebagai negara Islam, suatu cita-cita yang juga diperjuangkan PAS, tetapi dimensinya berbeda. Sudut pandang Mahathir dalam menafsirkan

³⁵ Koalisi yang dibangun sejumlah “partai oposisi” yang melibatkan antara lain Partai Keadilan, Democrat Action Party (DAP) dan PAS mengalami perpecahan. Ini terjadi saat DAP menyatakan tidak bersedia berkoalisi dengan PAS karena tindakan PAS yang bersikeras untuk mengajukan legislasi hudud di parlemen. DAP sendiri adalah partai politik yang didominasi oleh etnis China. Uraian mengenai pemikiran dan kebijakan Islamisasi PAS di Kelantan dapat dibaca dalam, Ismail Yusoff, *Tuan Guru Nik Abdul Aziz: Pemikiran Agama dan Politik* (Malaysia: Universiti Utara Malaysia Press, 2015), 181-216.

³⁶ T. N. Harper, *The End of Empire and The Making of Malaya*, 376

Malaysia sebagai negara Islam perlu dipahami dalam kerangka yang lebih *normative-substantive*, bukan seperti konsepnya PAS; yang sangat “*syariah oriented*” dan bersifat rigid atau skripturalistik.³⁷

Pandangan Mahathir ini didasari dengan keyakinan bahwa apa yang selama ini ditafsirkan sebagai praktik-praktik Islam di negara-negara Arab, yang mengatasnamakan diri sebagai Negara Islam, justru tidak sedikit yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Mahathir juga tidak setuju dengan ajakan “kembali ke era Nabi” sebagai rujukan bagi umat Islam modern. Umat Islam saat ini berada dalam kondisi dan lingkungan sosial yang telah jauh berbeda, sehingga tidak relevan untuk ditarik kembali ke belakang. Bagi Mahathir, tantangan krusial umat Islam dan kelompok Melayu adalah soal keterbelakangan ekonomi dan pendidikan. Islam, mau tidak mau harus menjawab persoalan umat saat ini. Dengan dasar itu dapat dimengerti bahwa “kebijakan Islamisasi” yang dilakukan Mahathir selalu mengkaitkan antara ke-Islam-an dengan modernisasi dan pembangunan ekonomi.

Soeharto: dari Represi ke Kooptasi

Apa yang dilakukan oleh Mahathir selama berkuasa, bukan hanya terjadi di Malaysia. Di Indonesia, Presiden Soeharto juga menerapkan strategi yang kurang lebih sama. Bila awalnya, terutama sejak awal 1970-an, mekanisme yang digunakan lebih represif, tetapi jelang akhir 1980-an mulai melunak, dan model kooptasi terhadap gerakan-gerakan Islam pun mulai diterapkan.³⁸ Strategi kooptasi ini dibarengi dengan kebijakan membangun lembaga-lembaga Islam untuk menarik simpati kaum muslim.³⁹ Hamper

³⁷ Salah satu buku terbaik yang mengulas mengenai perjalanan kiprah politik PAS dalam politik di Malaysia dan jenis ideologi konservatifme Islam yang dibawanya, dapat dibaca dalam Farish A. Noor, *The Malaysian Islamic Party PAS 1951-2013: Islamism in Mottled Nation* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013)

³⁸ Okrisal Eka Putra, “Hubungan Islam Dan Politik Masa Orde Baru,” *Jurnal Dakwah IX*, no. 2 (2008): 185–201.

³⁹ Mukhlis Rahmanto, “Berderma Dan Sejarah Sosial Politik Islam Indonesia,” *AFKARUNA, Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 2 (2015): 268–272.

sama dengan Soeharto, sejak berkuasa hingga akhir 1980-an lebih dikenal sebagai seorang *abangan*, kemudian berubah menjadi muslim taat atau santri, bersamaan dengan kebijakan pro-Islam yang dikembangkan.

Cara Soeharto menangani kelompok-kelompok Islam berubah drastis sejak akhir 1980-an. Politik “banting setir” ini tidak hanya mengejutkan kelompok Islam, tetapi juga bagi mitra-mitra politik “sekuler” maupun tentara. Perubahan politik domestik, terutama ditandai dengan semakin sulitnya tentara untuk dikendalikan dan berlangsungnya transformasi kelas menengah muslim, ditandai antara lain dengan semakin banyaknya intelektual dan profesional muslim yang muncul, menjadi pertimbangan Soeharto untuk mengubah strategi pendekatan terhadap kelompok-kelompok Islam: dari kofrontasi dan represi ke model kooptasi. Ia menyadari betul, Islam menjadi kekuatan politik signifikan yang perlu diperhitungkan. Sebagai mitra koalisi, menggandeng Islam lebih taktis dan strategis dibandingkan kongsi lamanya dengan militer dan unsur-unsur sekuler.⁴⁰

Baik Presiden Soeharto, terutama sejak akhir 1980-an, maupun Perdana Menteri Mahathir Mohammad sejak pertengahan 1980-an, telah mengeluarkan banyak kebijakan yang mempromosikan Islam sebagai bagian program nasional, sekaligus konsolidasi kekuasaan politiknya.⁴¹ Di Indonesia, kebijakan yang sering disebut sebagai politik Islamisasi (*Islamisation politics*), muncul melalui berbagai kegiatan masif seperti pembentukan bank-bank Islam, pendanaan yang lebih besar bagi sektor pendidikan dan sekolah Islam, pengakuan eksistensi peradilan Islam, perayaan hari besar agama secara nasional, dan sebagainya. Selain itu, dengan kekuasaan politik yang dimiliki pemerintah memberikan akses

⁴⁰ Analisis terbaru menyangkut perubahan strategi Soeharto yang memilih berkoalisi dengan kelompok Islam dan meninggalkan tentara, telah diulas dengan rinci dalam tulisan Salim Haji Said, *Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto* (Bandung: Mizan, 2016)

⁴¹ Seyyed Vali Reza Nasr, *Islamic Leviathan: Islam and the Making of State Power*, 161

lebih besar bagi elit-elit Islam pada kekuasaan. Fenomena “islamisasi birokrasi” dan parlemen sejak pemilu 1992, menandakan berakhirnya “politik sekular dan abangan” digantikan dengan model politik baru dengan supremasi Islam.⁴²

Strategi Mempromosikan Islam

Beberapa kebijakan Islamisasi di Malaysia yang dilancarkan Mahathir, antara lain ditandai dengan pembentukan sejumlah bank Islam yang dikelola dengan prinsip-prinsip syariat, pembentukan lembaga Islam, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dengan kewenangannya yang luas dalam memberikan fatwa keagamaan dan agenda pemurnian akidah (*the sanctity of aqidah*), penerapan syariat Islam, pembentukan lembaga *think tank*, dan Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) pada 1992 sebagai upaya memperkuat citra visi keislaman pemerintah yang modern, dan pendirian Internasional Islamic University Malaysia (IIUM) sebagai ikon pendidikan Islam modern bertaraf internasional.⁴³ Untuk memperkuat legitimasi Islamnya, Mahathir “membajak” sejumlah politisi dan intelektual muslim yang awalnya sebagai lawan politik, untuk bergabung dalam pemerintahan dan menjadikannya sebagai sekutu penting.⁴⁴ Bahkan Ia juga menegaskan Malaysia sebagai “Negara Islam”.

Dalam lima tahun terakhir, sejumlah elite UMNO juga mendukung hukum Islam, *hudud*, dan mengusulkan identitas Islam sebagai agama negara dalam konstitusi dipertegas menjadi “Islam Sunni”. Pemerintah

⁴² Masdar Hilmy, *Islam and Democracy in Indonesia: Piety and Pragmatism* (Singapore: ISEAS, 2010), 22-29.

⁴³ Chinyong Joseph Liow, *Piety and Politics: Islamism in Contemporary Malaysia*, 38

⁴⁴ Pada 1982 Mahathir menarik Anwar Ibrahim, Ketua Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) yang memiliki kedekatan politik dengan PAS, untuk bergabung dengannya di UMNO. Lihat, Michael G. Peletz, “Islam and The Cultural Politics of Legitimacy: Malaysia in The Aftermath of September 11, dalam Robert W. Hefner (editor), *Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization*, (Princeton: Princeton University Press, 2005), 247.

juga mendukung *privilege* penggunaan kata “Allah” hanya untuk muslim, dan melarang pemeluk lain menggunakannya. Politik Islamisasi dalam gradasi yang berbeda dilanjutkan oleh rejim setelahnya, Abdulah Badawi dan Nadjib Abdul Razak. Maka tidak aneh jika UMNO kemudian dianggap lebih fundamentalis dibandingkan PAS.

Seperti dicatat oleh Nasr, kebijakan Islamisasi politik Mahathir yang masif berlangsung sekitar 10 tahun pertama kekuasaannya. Menginjak 1990-an, saat kekuasaan Mahathir sangat kuat dan UMNO tampil sebagai kekuatan hegemonik tanpa saingan berarti, kebijakan Islamisasi politik tidak lagi menjadi perhatian serius pemerintah.⁴⁵ Hal sebaliknya justru terjadi di Indonesia. Pada masa awal konsolidasi kekuasaannya hingga awal 1980-an, Soeharto dengan terang-benderang menunjukkan sikap permusuhannya dengan kelompok Islam, dan tidak sedikitpun menunjukkan simpati terhadap Islam. Alih-alih menggunakan retorika Islam, Soeharto tidak segan memberikan ancaman keras kepada sejumlah tokoh dan organisasi kemasyarakatan yang ‘ngotot’ menampilkan jargon Islam. Tetapi semua berubah total setelah Soeharto meninggalkan mitra lama sekularnya, dan merangkul Islam sebagai sekutu politik barunya.

Kebijakan pro-Islam Soeharto, ditunjukkan dengan sejumlah kebijakan Orde Baru yang semakin mengakomodasi beberapa hal yang dianggap sebagai kepentingan umat Islam. Kebijakan ini, dari kaca mata politik banyak dilihat sebagai kooptasi, lebih bermotif kepentingan politik semata. Sejumlah kebijakan itu diantaranya:⁴⁶ *pertama*, semakin banyaknya elit terdidik Islam yang masuk dalam pemerintahan. Terutama, seiring dengan dibentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) tahun 1990. *Kedua*, membuat undang-undang yang pro-Islam, yaitu adanya beberapa produk undang-undang yang mengakomodasi kepentingan umat Islam. Misalnya, Undang-Undang Pendidikan Nasional (UU PN) dan

⁴⁵ Seyyed Vali Reza Nasr, *Islamic Leviathan: Islam and the Making of State Power*, 161.

⁴⁶ Lihat penjelasan dan pembahasan rinci Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik di Indonesia*, 273-310.

Undang-Undang Peradilan Agama (UU PA) pada 1989. *Ketiga*, akomodasi kultural, yaitu penerimaan Orde Baru terhadap idiom-idiom Islam ke dalam kosa kata instrumen politik dan ideologi negara. Negara banyak mempromosikan kegiatan-kegiatan Islam seperti festival, pameran, dan sebagainya. *Keempat*, berdirinya banyak bank Islam yang menawarkan transaksi berdasar ekonomi syariat. Yang tidak kalah penting, Soeharto juga menunaikan ibadah haji, yang secara simbolik dimaknai bahwa dirinya telah berubah menjadi “Muslim yang saleh”.

Berbeda dengan Mahathir yang menggunakan Islam untuk menciptakan kekuasaan hegemonik, Soeharto memilih meninggalkan aliansi lamanya dan “berbulan madu” dengan kekuatan Islam, dengan tujuan sebagai “jaring pengaman” transfer kekuasaan yang sedang direncangkannya. Sejak pertengahan 1990-an, terdengar bahwa Soeharto telah mempersiapkan putri tertuanya sebagai calon penggantinya.⁴⁷ Tapi takdir menentukan lain, proyek persekutuan Islam yang dirintisnya berantakan, bukan karena tindakan *offensive* lawan politiknya, tetapi oleh krisis moneter tahun 1997 yang memicu krisis politik. Timbulah kemudian gelombang reformasi politik menuntut tidak hanya perubahan politik nasional, tetapi juga mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan. Meski berbagai cara telah dilakukan untuk terus bertahan, tetapi semua tidak membuahkan hasil.⁴⁸ Karena tidak ada pilihan lain yang lebih baik, Soeharto menyatakan mundur pada 21 Mei 1998. Bersamaan dengan itu pula, politik “bulan madu” Soeharto dengan kelompok Islam juga berakhir.

⁴⁷ Isu yang beredar luas dikalangan elit politik, Siti Hardiyati Rukmana, atau mbak Tutut, dipersiapkan untuk mengambil alih Golongan Karya, dan R. Hartono, mantan KSAD dan loyalis Soeharto, akan memimpin ICMI. Sementara sejumlah tentara loyalis Soeharto lainnya yang memegang posisi strategis adalah Jend. Feisal Tanjung yang menjabat Panglima ABRI, dan Letjen. Prabowo Subianto sebagai komandan Pangkostrad. Tiga petinggi militer itu, Tanjung, Hartono, dan Prabowo, banyak diasosiasikan dengan “faksi hijau” atau mereka yang berpihak kepada kelompok Islam di tentara. Faksionalisme dan perseteruan dalam militer dan Golkar dapat dibaca dalam Marcus Mietzner, *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia* (Singapore, Iseas, 2009), bab 3, 97-145.

⁴⁸ Peran yang dimainkan kelompok Islamis pro-rejim pada masa menjelang dan awal reformasi, dapat dilihat dalam tulisan Robert W Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton: Princeton University Press, 2000)

Berbeda dengan Soeharto, Mahathir nasibnya jauh lebih baik. Ia berhasil merancang suksesi yang lebih mulus dengan mengundurkan diri dan menunjuk orang kepercayaannya di UMNO, Abdullah Badawi, sebagai penggantinya. *Legacy* Mahathir masih mendapatkan penghormatan dalam perpolitikan Malaysia setelah kemundurannya. Sisi gelapnya sebagai penguasa yang sering bertindak otoriter, karena sering memanfaatkan *Internal Security Act* (ISA) untuk menumpas lawan politiknya,⁴⁹ tentu saja tidak dapat dilupakan. Tetapi bagaimanapun, fakta bahwa dia terpilih kembali dalam Pilihan Raya 2018, menunjukkan bahwa masa kekuasaan sebelumnya memberikan kesan positif di mata rakyat Malaysia, terutama dengan keberhasilannya dalam pembangunan ekonomi dan menciptakan stabilitas Malaysia.

Penutup

Di Malaysia era Mahathir hingga sekarang, aktor utama politik Islam lebih didominasi oleh negara atau elit pemerintahan yang berkuasa. Elite partai UMNO memainkan peran strategis. Di Indonesia, peran negara yang sangat dominan dalam melakukan politik Islamisasi berlangsung pada sejak akhir 1980-an hingga berakhirnya kekuasaan Soeharto akibat gerakan pro-demokrasi. Politik Islamisasi di Malaysia, dan pergeseran Soeharto dari kebijakan anti-Islam menjadi pro-Islam tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor tantangan politik domestik yang dihadapinya. Karenanya, politik Islam yang dimainkan rejim hakikatnya sebagai produk dari pertarungan politik (*political contentious*) yang sedang berlangsung. Oposisi keras dari kubu Islamis masa awal Orde Baru dijawab Soeharto dengan tangan besi.

⁴⁹ Penggunaan instrument repressif ISA oleh Mahathir yang ditujukan kepada lawan-lawan politiknya terjadi pada tahun 1986, 1994, dan 1998. Lihat, Norani Othman, "Islamisasi dan Demokratisasi di Malaysia dalam Konteks Regional dan Global" dalam Ariel Heryanto dan Sumit K. Mandal (editor), *Menggugat Otoriterisme di Asia Tenggara: Perbandingan dan Pertautan antara Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: Gramedia, 2004), 252.

Mirip dengan Soeharto, Mahathir juga menggunakan tangan besi, tetapi ada perbedaan dalam memainkan 'kartu Islam'. Mahathir memukul balik PAS dan oposisi konservatif lainnya dengan membangun klaim dan legitimasi rejimnya jauh lebih Islami dibanding apa yang dituduhkan penentangannya. Proyek islamisasi secara masif dibangun untuk menangkis isu-isu Islam yang dilancarkan PAS. Cara ini terbukti lebih ampuh daripada yang dilakukan Soeharto melalui domestikasi politik Islam. Baru kemudian, politik Islam model Mahathir yang lebih efektif diikuti Soeharto melalui kebijakan Islamisasi sejak akhir 1980-an.

Baik di Malaysia maupun di Indonesia, politik Islamisasi lebih terkait dengan urusan menjaga, mempertahankan, dan melebarkan kekuasaan politik rejim yang berkuasa. Oleh karena itu, politik Islam oleh pemerintah, tidak jauh dari soal bagaimana seni mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan politik. Kebijakan Islamisasi pada hakikatnya dilandasi oleh pragmatisme politik, yakni survival kekuasaan, bukan motif ideologis. Motif inilah yang memberi alasan bagaimana kebijakan tentang Islam mudah berubah sesuai dengan kebutuhan rejim. Pada sisi ini, strategi Islamisasi dapat dilihat sebagai pilihan rasional politisi untuk memperoleh keuntungan politik kekuasaan, seperti ditegaskan Geddes (1994), menemukan pembenarannya. Tetapi apa yang dilakukan Soeharto lebih merefleksikan pada kepentingan pribadi atau personalnya. Jika pun sedikit diperluas, akan mencakup kroni terdekatnya (keluarga dan saudara). Sementara pada diri Mahathir lebih terlihat demi kepentingan survival kelompok politik yang sedang berkuasa, UMNO, daripada kepentingan pribadi.

Politik Islamisasi Mahathir berlangsung bersamaan dengan penyingkiran sekaligus represi terhadap aktifis politik PAS yang sama-sama mengumandangkan suara Islam. Bila itu bermotif ideologis, besar kemungkinan lawan islamisnya akan dirangkul. Berbaliknya arah secara tiba-tiba, kebijakan, dan orientasi politik Soeharto; dari "anti-Islam" ke

“pro-Islam” juga sepenuhnya didasari motif keuntungan politis yang lebih besar bagi survival kekuasaannya, daripada mempertahankan aliansi dengan mitra lamanya yang sekuler.

Meskipun sama-sama menggunakan Islam sebagai instrument politik, tetapi terdapat perbedaan menyolok. Mahathir aktif memobilisasi gerakan Islamisasi politik pada separuh pertama dalam kekuasaan (awal 1980-an hingga awal 1990-an). Setelah posisi politiknya kuat, baik dirinya sebagai Perdana Menteri dan UMNO selaku partai pemerintah, kartu Islam tidak banyak lagi dimainkan. Sementara, Soeharto gencar menggunakan ‘kartu politik Islam’ pada sepertiga masa di akhir kekuasaannya, akhir 1980-an hingga 1990-an. Politik Islamisasi Soeharto lebih dirancang untuk mengawal rencana transisi politik kepemimpinan Indonesia setelahnya. Perbedaan lain, jika Soeharto banyak berurusan dengan militer dalam proyek politik, salah satu implikasinya adalah muncul penentangan keras sejumlah jenderal setelah Ia merangkul Islam. Di mata sejumlah jenderal, Soeharto dianggap mengkhianati tentara yang menjadi partner politik setia masa sebelumnya. Kebijakan politik Mahathir tidak banyak berurusan dengan tentara. Beda dengan Indonesia, tentara Malaysia tidak banyak terlibat dalam politik.

Dalam konteks oposisi Islam terhadap penguasa, yang dapat dilihat sebagai ekspresi identitas perlawanan terhadap kekuasaan otoriter Orde Baru pada masa awal pemerintahannya, tindakan Soeharto merangkul Islam pada babak selanjutnya, menarik untuk dicermati. Politik Islamisasi Soeharto sejak akhir 1980-an membuktikan bahwa penguasa, demi kepentingan survivalnya dapat mentransformasikan apa yang disebut Castells (2003) sebagai identitas perlawanan (*resistance identity*), yang sebelumnya di mainkan oposisi, berbalik arah menjadi identitas milik penguasa melalui cara-cara kooptasi. Melalui Soeharto, suara-suara kelompok Islam yang awalnya menjadi bagian dari *resistance identity*, berubah fungsi menjadi legitimasi kekuasaannya (*legitimizing identity*). Sebaliknya,

para aparatus pendukung lamanya (militer dan sipil) mengalami “*down grade*” setelah ditinggalkan, berubah menjadi penentang yang tidak banyak diperhitungkan.

Sistem politik pasca Mahathir tidak menunjukkan perubahan mendasar terhadap model kekuasaan Malaysia yang semi otoriter, dengan UMNO sebagai partai negara yang hegemonik. Sementara di Indonesia, situasi pasca Soeharto mengalami pemutarbalikan, dari Indonesia yang otoriter menjadi negara demokratis. Bila di Malaysia pasca Mahathir, aktor-aktor politik tidak banyak berubah, termasuk negara, masih aktif memainkan kartu Islam. Seperti Abdullah Badawi yang mempromosikan Islam Hadhari, dan Najib Razak yang aktif mengkampanyekan UMNO sebagai pembela etnis Melayu dan Islam. Penentang Islamisnya tetaplah sama, PAS. Tapi perebutan “wacana pembela Islam” tidak lagi sekeras era Mahathir. Perkembangan ini, bisa jadi disebabkan juga oleh munculnya sejumlah kekuatan politik baru, terutama yang dimotori sejumlah LSM pro-demokrasi.

Di Indonesia, arena politik ditandai dengan munculnya aktor-aktor baru, baik berwujud banyaknya partai politik maupun ormas-ormas Islam berpengaruh. Dalam isu politik Islam, pemerintah tidak lagi menjadi pemain tunggal yang memiliki pengaruh sekuat sebelumnya. Dengan kata lain, upaya islamisasi politik pasca Soeharto telah diambil alih perannya oleh sejumlah politisi partai politik dan elit-elit Islam, seperti terlihat pada fenomena maraknya Perda syariat Islam di sejumlah daerah pada masa awal reformasi. Untuk menciptakan kebijakan pemerintahan yang pro-Islam, karena tidak lagi soal bagaimana negara atau pemerintah mengakomodasi, tetapi sepenuhnya tergantung pada usaha keras dan perjuangan kekuatan politik Islam itu sendiri.

Referensi

- Alatas, Syed Farid. *Democracy and Authoritarianism in Indonesia and Malaysia*. London: Macmillan Press, 1997.
- Bresnan, John. *Managing Indonesia: The Modern Political Economy*. New York: Columbia University Press, 1993.
- Castells, Manuel. *The Power of Identity*. 2 edition. United Kingdom: Blackwell Publishing, 2004.
- Darmawijaya. “Islam Dan Kekuasaan Orde Baru: Membaca Kembali Politik De-Islamisasi Soeharto.” *Sosiologi Reflektif* 10, no. 1 (2015): 63–84.
- Effendi, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik di Indonesia*. Jakarta: Paramadina dan PPIM, 2009.
- Elson, R.E. *The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan*. Jakarta: Serambi, 2009.
- Fauzi, Ahmad, Abdul Hamid, and Muhamad Takiyuddin. “Islamist Conservatism and the Demise of Islam Hadhari in Malaysia.” *Routledge, Taylor & Francis Group. London & New York* 25, no. 2 (2014): 159–180. <http://dx.doi.org/10.1080/09596410.2014.880549>
- Geddes, Barbara. *Politician's Dilemma: Building State Capacity in Latin America*. Berkeley: University California Press, 1994.
- Hadi, Syamsul. *Strategi Pembangunan Mahathir dan Soeharto*. Jakarta: Pelangi Cendekia, 2005.
- Harper, T. N. *The End of Empire and the Making of Malaya*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- Hefner, Robert W. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press, 2000.
- Hefner, Robert W. Hefner (editor). *Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization*. Princeton: Princetoun University Press, 2005.
- Heryanto, Ariel dan Sumit K. Mandal (editor). *Menggugat Otoriterisme di Asia Tenggara: Perbandingan dan Pertautan antara Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: Gramedia, 2004.

- Hilmy, Masdar. *Islam and Democracy in Indonesia: Piety and Pragmatism*. Singapore: ISEAS, 2010.
- James, Piscastori & Eickelman, Dale F. *Muslim Politics*. New Jersey: Princeton University Press, 1996.
- Kersten, Carool. *Islam in Indonesia: The Contest for Society Ideas and Values*. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- Lee, Julian C.H. *Islamization and Activism in Malaysia*. Singapore: ISEAS, 2010.
- Liow, Chinyong Joseph. *Piety and Politics: Islamism in Contemporary Malaysia*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Mackie, Jamie. "Patrimonialism: The New Order and Beyond" in Edward Aspinall and Greg Fealy. *Soeharto's New Order and Its Legacy*. Australia: Asian Studies Series Monograph 2 ANU, 2010.
- Mauzy, Diane K. & Milne, R.S. *Malaysian Politics under Mahathir*. London-New York: Routledge, 1999.
- McAdam, Doug, Sidney Tarrow, and Charles Tilly. "Comparative Perspectives on Contentious Politics" dalam Mark Irving Lichbach and Alan S. Zuckerman. *Comparative Politics: Rationality, Culture, and Structure*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Menchik, Jeremy. "Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi Party between Democracy and Integralism by Remy Madinier (Review)." *Project Muse Indonesia*, no. 101 (2016): 139–143.
- Mietzner, Marcus. *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Turbulent Transitions to Democratic Consolidation*. Singapore: ISEAS, 2009.
- Motten, Abdul Rashid (editor). *Government and Politics in Malaysia*. Malaysia: Cengage Learning, 2012.
- Mubarak, M. Zaki. *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran, dan Prospek Demokrasi*. Jakarta: LP3ES, 2008.
- Müller, Dominik M. *Islam, Politics and Youth in Malaysia: The Pop-Islamist Reinvention of PAS*. New York: Routledge, 2014.
- Nawab, Mohamed, and Mohamed Osman. "The Islamic Conservative Turn in Malaysia: Impact and Future Trajectories." *Contemporary Islam* (2016). <http://dx.doi.org/10.1007/s11562-016-0373-3>.

- Nasr, Seyyed Vali Reza. *Islamic Leviathan: Islam and the Making of State Power*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Noor, Farish A. *The Malaysian Islamic Party PAS 1951-2013: Islamism in Mottled Nation*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013.
- Nurhasanah. "Politik Kebijakan Islamisasi Mahathir." *Dialog* XXXII, no. 68 (2009): 65–77.
- Pelets, Michael G. "Islam and The Cultural Politics of Legitimacy: Malaysia in The Aftermath of September 11" in Robert W. Hefner (editor). *Remakin Muslim Politics: Pluralism, Contestation and Democratization*. Princeton: Princeton University Press, 2005.
- Putra, Okrisal Eka. "Hubungan Islam Dan Politik Masa Orde Baru." *Jurnal Dakwah* IX, no. 2 (2008): 185–201.
- Porter, Donald J. *Managing Politics and Islam in Indonesia*. London: Routledge, 2002.
- Rahmanto, Mukhlis. "Berderma Dan Sejarah Sosial Politik Islam Indonesia." *AFKARUNA, Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 2 (2015): 268–272.
- Ramage, Douglas. *Politics in Indonesia: Democracy, Islam, and the Ideology of Tolerance*. London: Routledge, 1995.
- Stark, Jan. "Constructing an Islamic Model in Two Malaysian States: PAS Rule in Kelantan and Terengganu." *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia* 19, no. 1 (2004): 51–75. <https://muse.jhu.edu/article/400296/pdf>.
- Said, Salim Haji. *Menyaksikan 30 tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto*. Bandung: Mizan, 2016.
- Tarrow, Sidney G. *Power in Movement: Social Movement and Contentious Politics*. Cambridge, Cambridge University Press, 2011.
- Wain, Barry. *Malaysian Maverick: Mahathir Mohammad in Turbulent Times*. London: Palgrave Macmillan, 2009.
- Way, Lucan & Levitsky, Steven. *Competitive Authoritarianism: Hybrids Regime after the Cold War*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Yamin, Moh. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar I-III*. Jakarta: Jajasan Prapanca, 1959.
- Yusoff, Ismail. *Tuan Guru Nik Abdul Aziz: Pemikiran Agama dan Politik*. Malaysia: University Utara Malaysia Press, 2015.

